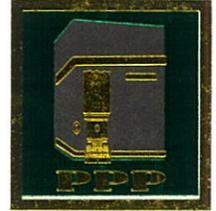




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270  
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532  
E-mail : fraksi\_ppp@dpr.go.id / fppp\_dpr\_ri@yahoo.com / set\_fppp@dpr.go.id



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022 BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 19 Agustus 2021  
Oleh Juru bicara FPPP DPR-RI : Sy. Anas Thahir  
Anggota DPR-RI Nomor : A-470

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alikum Wr. Wb.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,  
Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan RI dan jajarannya,  
Yang kami hormati Saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk menjalankan tugas konstitusional kita membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya,

Tak lupa saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya, yang telah menjadi suri tauladan terbaik sehingga kita dapat mengikuti jejaknya hingga akhir zaman...amiin

**Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,**

Bulan ini, Agustus 2021 bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke 76, dengan suasana penuh keharuan sekaligus keprihatinan akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP) mengucapkan, "Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76 tahun", semoga pencapaian tahun ini dan yang akan datang semakin meningkatkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita luhur yang telah diwariskan para pendahulu kita, sekaligus memantapkan diri mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana menjadi amanat konstitusi.

## Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati

### Makro Ekonomi

1. Pada tanggal 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2022 dan Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Pemerintah telah menyusun asumsi makro ekonomi 2022 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%-5,5%, inflasi sebesar 3,0%, suku bunga SUN 10 tahun sebesar 6,82%, nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS, harga minyak mentah US\$63 per barel, lifting minyak sebesar 703 ribu per hari dan lifting gas sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Sementara defisit anggaran ditetapkan sebesar 5,5%.
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%-5,5% termasuk optimis tetapi insya Allah bisa tercapai, meski ekonomi tahun depan masih dalam masa konsolidasi akibat Pandemi Covid-19. Berkaca pada ekonomi kita saat ini, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sudah masuk zona positif dengan tumbuh 7,07% meskipun baseline pertumbuhan ekonomi tahun ini masih lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Fraksi PPP menilai pertumbuhan ekonomi tahun 2022 harus lebih tinggi dari tahun ini yang didorong oleh membaiknya peningkatan mobilitas masyarakat yang ditopang juga oleh semakin baiknya penanganan Covid-19. Melonggarnya restriksi akan mendorong kenaikan aktivitas ekonomi sekaligus diikuti oleh asumsi bahwa vaksinasi sudah terdistribusi merata ke sebagian besar daerah di Indonesia sehingga *herd immunity* sudah merata di banyak daerah. Sementara dari sisi pertumbuhan investasi tahun 2022 diperkirakan bertumbuh positif sejalan dengan mulai berdampaknya pelonggaran-pelonggaran birokrasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sudah dibuatkan aturan turunannya di tahun ini. Dengan kondisi tingkat konsumsi masyarakat yang menurun, kita berharap investasi membaik sehingga menopang target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Lebih dari itu, Fraksi PPP juga berharap pemerintah bisa mendorong efisiensi investasi sehingga memberikan nilai tambah yang kuat terhadap daya saing perekonomian. Rasio Incremental Capital Output Ratio ( ICOR ) Indonesia masih cukup tinggi yakni dalam kisaran level 6,3. Rasio Incremental Capital Output Ratio ( ICOR ) Indonesia yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang masih rendah. ICOR Indonesia lebih tinggi dibandingkan semua negara di Asean dan ICOR yang tinggi tersebut membuat investasi di Indonesia melambat. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk mendorong semua level kepala daerah memiliki visi yang sama bagaimana bisa menarik minat investasi sekaligus bagaimana mendorong agar investasi di daerahnya lebih efisien.
3. Dalam kerangka memacu pertumbuhan ekonomi tahun depan, Fraksi PPP juga meminta pemerintah mempercepat penanganan tingkat kasus Covid-19, melonggarkan pengetatan aktivitas ekonomi dan segera meningkatkan angka vaksinasi. Pemerintah juga harus segera memulihkan sektor-sektor ekonomi terutama UKM yang berkontribusi positif dan menjadi tumpuan hidup masyarakat serta menyerap banyak tenaga kerja. Kehidupan rakyat sekarang semakin sulit, PHK terus meningkat, pendapatan menurun dan keresahan masyarakat meningkat yang dikhawatirkan akan mendorong peningkatan tingkat kejahatan.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan terhadap target inflasi sebesar 3% yang sangat penting untuk bisa dijaga agar momentum daya beli masyarakat tidak semakin menurun di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sudah tertekan akibat pandemi. Tingkat inflasi harus lebih rendah dari target pertumbuhan

BKF  
DJA  
SD1

Kemenko Ekon  
Bappenas  
BKPM  
Kemendagri  
BKF  
DJA  
SD1

Kemenko Ekon  
Bappenas  
Kemenkes  
Kem Kop UKM  
Kemenaker  
BKF  
DJPB  
DJA  
(Ekontim, PMK)  
SD1

Bappenas  
BKF  
DJA  
SD1

ekonomi dengan harapan tingkat daya beli tidak semakin tergerus yang dikhawatirkan bisa menambah jumlah penduduk miskin.

5. Target nilai tukar rupiah di posisi Rp14.350 per dolar AS cukup realistis untuk menopang ekspor, menahan laju inflasi dan naiknya impor. Namun kewaspadaan penuh terhadap kestabilan nilai tukar harus diarahkan pada kemungkinan normalisasi kebijakan The Fed dalam melakukan pengurangan stimulus atau *tapering off* dan perkembangan geo politik yang memungkinkan terjadinya risk off dimana dana-dana di negara berkembang termasuk negara kita ada tekanan lari ke luar. Fraksi PPP juga mendorong pemerintah terus meningkatkan basis investor domestik atas kepemilikan SBN agar nilai tukar rupiah tidak mudah goncang ketika terjadi aliran modal asing keluar (*capital outflow*) lantaran basis investor domestik meningkat. Meski demikian, untuk target suku bunga SUN 10 tahun, yakni 6,82 persen menurut Fraksi PPP angka tersebut masih bisa ditekan karena ada kecenderungan trend suku bunga rendah baik di negara maju dan juga banyak negara lainnya.
6. Terkait dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan akan berkisar pada US\$63 per barel dan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703 ribu barel dan 1.036 ribu barel setara minyak per hari cukup realistis, meski Fraksi PPP berharap pemerintah terus berupaya agar lifting minyak bisa terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak dalam negeri dan menekan impor BBM. Target *lifting* minyak Indonesia tergolong cukup rendah. Meski begitu, realisasi *lifting* minyak rata-rata tercatat meleset dari target yang dipatok dalam asumsi makro pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Maka, tak heran jika Indonesia dikatakan termasuk negara penghasil minyak yang tidak bisa menikmati dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan, gejolak harga minyak dunia cenderung membuat pemerintah khawatir. Sebab, konsumsi minyak dan energi yang tinggi, tidak mampu dipenuhi dengan kemampuan dalam negeri dan bergantung pada impor dari negara lain

### Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

#### Penerimaan Negara

1. Terkait dengan penerimaan negara, pemerintah mematok pendapatan negara dalam RAPBN 2022 senilai Rp1.840,7 triliun, belanja negara sebesar 2.708,7 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Pada sisi penerimaan negara, target setoran perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
2. Terkait dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan sebagai berikut.  
**Pertama**, selama satu dekade sejak 2010-2020 penerimaan pajak selalu meleset dari target. Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Tahun ini penerimaan perpajakan juga diperkirakan akan meleset karena pandemic covid 19 yang mengakibatkan kondisi ekonomi berkontraksi. Dengan kondisi tersebut, Fraksi PPP menilai pemerintah belum bekerja optimal dalam mengupayakan peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan.  
**Kedua**, pemerintah harus berfokus pada bagaimana cara mengoptimalisasi penerimaan pajak, baik dengan perluasan basis pajak (*tax base*) maupun dengan

BI  
BKF  
DJA  
SD1

Kem ESDM  
SKK Migas  
BKF  
DJA (PNBP  
SDA)  
SD1

DJP  
DJBC  
BKF  
SD1

meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, dengan menekan penghindaran pembayaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

**Ketiga**, peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan edukasi perpajakan. Termasuk bagaimana bisa mengembangkan model pengawasan yang terstruktur dan terukur serta melakukan reformasi perpajakan dalam hal organisasi, teknologi, dan basis data termasuk memaksimalkan pertukaran data perpajakan atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.

**Keempat**, tax ratio perpajakan kita masih bisa ditingkatkan mengarah ke angka ideal menurut standar internasional, yaitu 15% keatas. Tax ratio kita tahun 2020 hanya 8,94%. Tax ratio pernah mencapai 13,7% pada tahun 2014, tetapi selama pemerintahan Jokowi tidak mampu mempertahankan angka itu bahkan terus menurun dibawah 9 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam perpajakan belum optimal.

3. Terkait dengan penerimaan negara bukan pajak pemerintah menargetkan Penerimaan sebesar Rp333,2 triliun. Tidak berbeda jauh dengan pengelolaan perpajakan, pengelolaan PNBPN juga belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya terhadap anggaran negara juga kurang maksimal.

Ada penerimaan yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara lebih maksimal seperti penerimaan dari sektor pertambangan. Ada potential lost dari pengelolaan pertambangan di Indonesia seperti dari sektor minerba terdapat triliunan dari penerimaan royalti dan iuran tetap yang sampai saat ini belum maksimal masuk ke kas negara dan berpotensi hilang. Selain itu, potensi penerimaan negara dari sektor perikanan juga belum tergarap secara optimal karena dalam pengelolaan PNBPN dari sektor kelautan dan perikanan tarif PNBPN yang sangat kecil dan juga maraknya kegiatan illegal fishing. Selain itu ada potensi penerimaan dari jenis pendapatan jasa yang bisa lebih diintensifkan, seperti pendapatan hak dan perizinan serta pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan dan kenavigasian. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah melakukan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBPN terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan PNBPN. PNBPN yang dibayarkan oleh para wajib bayar harus bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang tarif dari PNBPN terutama penerimaan dari kegiatan usaha yang profit oriented seperti di bidang pertambangan, perikanan ataupun perizinan lainnya karena dibandingkan dengan besarnya profit yang diterima oleh para pelaku usaha, saat ini tarif PNBPN dirasa masih kurang menguntungkan bagi negara. Pemerintah juga perlu menindak tegas banyaknya kegiatan ilegal dalam sektor usaha penyumbang PNBPN seperti *illegal mining dan illegal fishing*.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap pertumbuhan positif yang dialami sektor informasi dan komunikasi selama pandemi Covid-19, dapat menjadi sumber PNBPN yang lebih besar. Karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan PNBPN dari laba BUMN PT Telekomunikasi Indonesia untuk tahun anggaran 2022 dapat mendukung kebijakan dan anggaran Kominfo untuk digitalisasi pendidikan secara merata. Peningkatan penerimaan negara tersebut untuk meningkatkan fasilitas sarana pembelajaran daring (online), khususnya bagi keluarga peserta didik yang kurang mampu dan berada di daerah yang memiliki akses rendah terhadap teknologi informasi, termasuk pesantren dan madrasah di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung sarana komunikasi dan informatika agar memperkuat pertumbuhan usaha ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, termasuk melalui usaha daring yang tumbuh di masa pandemi Covid-19.

Kem ESDM  
KKP  
Kemenhub  
DJA (PNBP  
SDA dan  
PNBP KL)  
SD1

Kem BUMN  
Kem Kominfo  
Kem Kop UKM  
DJA (PNBP  
SDA dan  
PNBP KL)  
SD1

## Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,

### Belanja Negara

1. Dalam RAPBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar 2.708,7 triliun meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Fraksi PPP menilai angka belanja negara tersebut cukup besar untuk mendorong stimulus ekonomi, tentu dengan catatan bahwa realisasi belanja negara tidak menghadapi kendala masalah penyerapan dan kebocoran anggaran karena permasalahan APBN dari tahun ke tahun ada di tataran realisasinya dan penyerapan dan tingkat korupsinya.
2. Terkait dengan sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara dan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Fraksi kami perlu menyampaikan kembali tentang sejumlah permasalahan terkait bidang kesehatan. Pemerintah perlu memberikan kepedulian dan penghargaan kepada tenaga kesehatan karena telah memberikan banyak pengorbanan dalam upaya mengatasi masalah pandemi covid 19 ini. Mereka menjadi ujung tombak dalam upaya mengetasi pandemic covid 19. Pemerintah juga kurang memiliki kepedulian terhadap tingginya biaya tes polymerase chain reaction(PCR) untuk diagnosis virus corona (Covid-19) dan baru diturunkan setelah memperoleh banyak kritik dari masyarakat. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur harga reagensia/tes PCR. Fraksi PPP juga mendorong perlunya perbaikan di internal BPJS dengan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan melakukan penyisiran terhadap perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang belum memberi fasilitas BPJS Kesehatan kepada karyawannya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kepesertaan masyarakat dan tentunya memberi dampak pendisiplinan dalam pembayaran iuran.
3. Berkaitan dengan Penanganan Pandemi Covid 19, Fraksi PPP memandang masih lemah dan belum komprehensif , baik dari sisi manajemen kepemimpinan penanganan pandemi, SDM, upaya kesiapsiagaan dan sarana prasarana, koordinasi dan komunikasi, penyiapan anggaran bahkan serapan anggaran yang disediakan, dll. Buruknya manajemen dan komunikasi penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah menyebabkan kurangnya literasi masyarakat terkait produk obat-obatan selama terjadi pandemi. Akibatnya banyak peredaran dan klaim tentang manfaat obat-obatan covid 19 yang belum teruji klinis. Selain meresahkan masyarakat, klaim obat-obatan ini juga berpotensi membahayakan kesehatan. Lebih dari itu pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat dan diperkirakan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan paling lambat secara global.
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyoroti sektor energi, terutama terkait subsidi energi dalam RAPBN 2022, yang direncanakan sebesar Rp134 triliun terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp77,5 triliun, serta subsidi listrik sebanyak Rp56,47 triliun. Sejalan dengan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target sasaran, pemerintah perlu melakukan perbaikan data penerima sasaran untuk memastikan agar subsidi atau bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Terkait dengan subsidi energi tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap mengingatkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kilang nasional untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional. Pembangunan kilang minyak akan mengurangi ketergantungan dengan impor BBM dan impor minyak mentah untuk diolah dikilang

DJPB  
DJA (Abid  
Ekontim,  
Abid PMK,  
Abid PHP  
BUN)  
SD3

Kemenkes  
DJA (Abid  
PMK, Dit  
HPP)  
SD2, SD3

Kemenkes  
BPOM  
DJA (Abid  
PMK)  
SD2

Kem ESDM  
Kem BUMN  
BKF  
DJA (PNBP  
SDA)  
SD4

minyak. Karena masalah utama saat ini Indonesia masih bergantung dengan impor BBM dan impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Sudah 25 tahun lebih Indonesia tidak membangun satu kilang pun. Pembangunan kilang terakhir adalah tahun 1995, dengan terbangunnya kilang Balongan yang berkapasitas 125 ribu barel per hari. Sejak 2011 Indonesia menghadapi defisit transaksi berjalan (CAD). Penyebab defisit tersebut adalah impor minyak yang besar. Keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Pemerintah harus serius menangani masalah ini. Pasalnya lifting minyak terus mengalami penurunan sedangkan konsumsi BBM terus meningkat.

- Bappenas  
Kementan  
KKP  
Kemenko Ekon  
DJA (Abid  
Ekontim)  
SD2,4**
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai anggaran untuk ketahanan pangan pada tahun 2022 direncanakan Rp76,9 triliun sangatlah penting. Krisis Kesehatan dan ekonomi yang terjadi saat ini jangan sampai diikuti dengan krisis pangan. Fraksi PPP juga meminta agar perwujudan ketahanan pangan tidak dilakukan dengan memperkuat impor pangan, tetapi dengan cara meningkatkan produktifitas keanekaragaman pangan dalam negeri. Pemerintah harus bisa menekan impor pangan terutama produk hortikultura dan melindungi kepentingan petani dalam negeri dari serbuan pangan impor. Petani dan nelayan yang merupakan bagian terbesar dari profesi di negara kita belum mampu menikmati kesejahteraan sehingga tidak banyak generasi muda yang tertarik untuk masuk dalam sektor ini.
  6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan perhatian terhadap anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2022 yang memperoleh anggaran sebesar Rp541,7 triliun (termasuk TKDD) atau 20,0 persen dari belanja negara. Fraksi PPP sangat prihatin bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan kita mengubah beberapa kebijakan di dalam sektor pendidikan, seperti ditiadakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dan pesantren, ditiadakannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang seharusnya menjadi UN terakhir dan juga proses PPDB dilaksanakan secara daring. Fraksi PPP menilai kegiatan proses belajar secara daring menjadi sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran, tetapi dengan kondisi tidak meratanya sebagian daerah dan kemampuan anak didik terhadap koneksi internet dan kepemilikan perangkat teknologi yang membuat sebagian anak didik tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dijadikan pengganti kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah.
  7. Fraksi PPP juga memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang sumber pembiayaannya bergantung dari iuran bulanan orang tua siswa mengalami tantangan finansial yang berat selama pandemi ini. Kegiatan operasional sekolah-sekolah dan pesantren seperti ini, yaitu sekolah swasta dan pesantren berbiaya rendah, pada umumnya sangat bergantung pada iuran bulanan dari orang tua siswa selain menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak terlalu menutupi biaya operasional sekolah. Menyadari hal itu, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah, dimana saat ini dimulai tahun ajaran baru untuk dapat memberikan bantuan kuota internet khusus bagi anak-anak sekolah dan membantu sekolah-sekolah swasta dan pesantren berbiaya rendah, terutama terkait dengan gaji guru, ustad dan staf sekolah selama masa pandemi. Fraksi PPP juga meminta kepada pemerintah agar guru honorer memperoleh subsidi atau bantuan sosial, mengingat honor mereka selama ini sangat rendah, kisaran Rp 300.000 - Rp 500.000 sebulan. Kondisi tersebut untuk mencegah kemungkinan terburuk yakni penutupan sekolah dan pesantren karena permasalahan keuangan, sementara sekolah-sekolah swasta dan pesantren berbiaya rendah sangat penting perannya dalam menyerap siswa baru, menyediakan akses pendidikan untuk siswa dan santri yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan berkontribusi mencerdaskan anak bangsa.
- Bappenas  
Kemendikbud  
Kemenag  
DJA (Abid  
PMK)  
SD3**
- Kemenag  
DJA (Abid  
PMK)  
SD3**

8. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk memastikan dan memaksimalkan bantuan operasional bagi pesantren terealisasi dan terdistribusi secara proporsional ke seluruh pesantren di Indonesia. (BOP) harus diberikan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan Islam yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan terdaftar di Kantor Kemenag. Fraksi PPP terus konsisten mendorong agar Bantuan Operasional Pesantren (BOP) ini tidak hanya diperuntukkan untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 ini saja, tetapi skema BOP ini harus terus berkelanjutan dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya mendorong pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam mendukung penyelenggaraan pendidikan secara lebih meningkat dan bermutu.

#### **Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,**

##### **Transfer Ke Daerah, Dana Desa (TKDD) dan Defisit Anggaran**

TKDD diproyeksikan mencapai Rp770,4 triliun atau meningkat Rp141,3 miliar dibandingkan outlook tahun 2021, yang diarahkan untuk peningkatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Fraksi PPP meminta pemerintah memantapkan pemanfaatan Dana Desa sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan publik antardesa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kemiskinan pedesaan. Fraksi PPP mendorong pemerintah agar Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung kewirausahaan UMKM dan BUMDes. BUMDes harus inovatif dan beradaptasi melihat peluang usaha yang muncul saat pandemi agar kegiatan ekonomi di desa tetap bergairah. UMKM dan BUMDes adalah unit ekonomi paling dekat dengan rakyat sehingga perlu diberdayakan dan berperan efektif dalam pengentasan kemiskinan pedesaan.

#### **Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Hormati,**

##### **Defisit anggaran dan Utang**

Dalam RAPBN 2022 defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Defisit anggaran negara kita tiap tahun terus membengkak akibat penerimaan negara yang dikontribusi dari perpajakan tidak pernah meningkat secara signifikan sementara belanja negara terus meningkat, terutama akibat pandemi covid 19. Dampak lebih lanjut adalah utang yang terus meningkat bahkan kenaikan utang melebihi kenaikan dari kemampuan kita mendorong penerimaan perpajakan. Fraksi PPP meminta penjelasan pemerintah terkait skenario penyelesaian utang, dibandingkan dengan kemampuan kita menghasilkan devisa dari ekspor, pariwisata dan jasa remitansi pengiriman tenaga kerja luar negeri.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,  
Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan RI dan jajarannya,  
Yang kami hormati Saudara Anggota Dewan,  
dan Hadirin yang berbahagia.**

Demikianlah Tanggapan dan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hal-hal lain yang belum disampaikan dalam Pemandangan Umum ini akan disampaikan pada saat Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya selanjutnya.

Kemenag  
DJA (Abid  
PMK)  
SD3

Kemendagri  
Kemendes  
PDTT  
DJPK  
SD4

BKF  
DJPPR  
DJA  
SD5,1

Kepada saudara Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Keuangan, Saudara-saudara Anggota Dewan, dan Hadirin sekalian diucapkan terimakasih atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan Pemandangan Umum kami.

Wallahul Muwafik Ila Aqwamith Thariq  
Wassalamualikum Wr Wb.

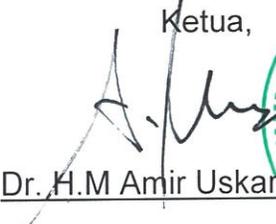
Jakarta, 19 Agustus 2021

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. H.M Amir Uskara, M. Kes

  
Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si

